

**PERILAKU MEDIA MASSA AMERIKA SERIKAT PADA  
PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2016**

***UNITED STATES MEDIA BEHAVIOR IN PRESIDENT ELECTION 2016***

**Siswanto**

Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Jalan Jend. Gatot Subroto. Kav.10, Jakarta Selatan  
sish\_jakarta@yahoo.com

Diterima tgl. 28/04/2017; Direvisi tgl. 4/05/2018; Disetujui tgl. 16/05/2018

**ABSTRACT**

*The Presidential election in the United State of America is a really democracy party which invited participation. The event was political laboratory which can see from much perspective, such as mass media perspective and much lesson learned from this event. The problem is that there are media in the country who sympathy and an antipathy to the presidential candidate, Donald Trump and Hillary Clinton. Therefore, American media behavior partially supported and attacked Hillary and partly supported and attacked Trump. This paper would like to assess media behavior in the election. Several concepts are used in this study that ideology of Liberalism, the subjective attitude of the individual namely; sympathy-antipathy, and political participation. Result of this study is information and knowledge about media behavior during American Presidential election 2016. The conclusion of this study that the United states media is generally partisan during the presidential election 2016. This partisan attitude relates to the socio-political conditions of American society.*

**Keywords:** *Presidential election, media behavior, sympathy-antipathy, Trump, Hillary*

**ABSTRAK**

Setiap Pemilu Presiden di Amerika Serikat adalah pesta demokrasi yang sangat mengundang partisipasi publik. Peristiwa ini juga merupakan laboratorium politik yang dapat ditinjau dari berbagai perspektif, misalnya perspektif peran media massa dan banyak pembelajaran yang bisa dipetik. Masalahnya pada Pemilu Presiden 2016 yang lalu perilaku media massa terbangun sikap simpati dan antipati terhadap kandidat Presiden Donald Trump maupun Hillary Clinton. Oleh karena itu, perilaku media Amerika sebagian mendukung dan menyerang Hillary dan sebagian lagi mendukung dan menyerang Trump. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji perilaku media massa di dalam pemilu tersebut yang didasarkan pada konsep Liberalisme, simpati-antipati, dan partisipasi politik. Hasil dari studi ini adalah informasi dan pengetahuan tentang perilaku media massa Amerika dalam Pemilu Presiden 2016. Akhirnya kesimpulan dari kajian ini bahwa perilaku media massa Amerika adalah partisan selama pemilu Presiden 2016 yang disebabkan oleh kondisi sosio-kultural dari masyarakat Amerika.

**Kata Kunci:** Pemilu presiden, Perilaku media, simpati-antipati, Trump, Hillary

**1. PENDAHULUAN**

Latar belakang dari penulisan paper ini didasarkan pertimbangan bahwa setiap pemilu Presiden Amerika Serikat merupakan peristiwa yang penting untuk dijadikan pelajaran. Amerika negara republik dan demokrasi tertua di dunia serta negara yang paling banyak melakukan pemilu setiap tahun sekitar empat sampai sengan lima kali melaksanakan pemilu baik di tingkat pemerintah federal maupun negara bagian (Yatanoor, 2005, p. 1). Hal ini menjadi bahan pembelajaran masyarakat internasional.

Kasus Pemilu Presiden Amerika Serikat tahun 2016 merupakan bahan kajian menarik baik dari perspektif akademik maupun praktis. Dari perspektif akademik Pemilu Presiden tahun 2016 memberi fakta-fakta dan informasi yang penuh konflik diantara kandidat dan pendukungnya, tetapi stabilitas politik-keamanan dan integrasi Amerika tetap utuh. Lebih jauh Pemilu Presiden ini untuk

mengetahui kapasitas politik para kandidat dan kemampuannya mengelola politik karena Presiden Amerika harus mampu mengontrol partainya, kongres (khususnya Senat), dan mampu meyakinkan para pihak untuk mengamankan kebijakannya (Laski, 1949, p. 173).

Dari perspektif praktis, Pemilu Presiden Amerika 2016 adalah pesta demokrasi yang mengundang minat masyarakat Amerika maupun internasional. Bagi masyarakat Amerika, kandidat tertentu didukung asalkan punya strategi jelas dalam memperbaiki ekonomi rakyat. Seperti diketahui bahwa program pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Obama belum sepenuhnya berhasil. Sebagai ilustrasi Presiden Roosevelt dimasa kampanye berjanji untuk mengatasi krisis ekonomi dengan mengembangkan strategi berimbang antara pembangunan sektor industri dan pertanian, serta menjamin akan adanya stabilitas harga barang dan komoditi pertanian (OL.L, 1933, p. 686). Oleh karena itu, setiap pemilu presiden menjadi harapan untuk perbaikan ekonomi.

Sedangkan, masyarakat internasional ingin mengetahui program-program kandidat khususnya program-program internasionalnya. Dalam konteks kebijakan global dan regional Amerika, Asia Pasifik merupakan salah satu daerah pengaruh (*sphere of influence*) dari negara adidaya ini. Oleh karena itu, pemimpin negara-negara kawasan ini ingin mengintip arah baru kebijakan negara Amerika. Arah baru kebijakan ini dapat dilihat dari pidato pelantikan Presiden Amerika Serikat setelah terpilih. Misalnya Presiden Kennedy pada pidato pelantikannya tahun 1961 menyatakan komitmennya pada hak-hak azasi manusia di dalam negeri dan seluruh dunia (Larkin, 2013, p. 351), lalu Presiden Trump tahun 2017 menyatakan keinginannya untuk fokus pada penyelesaian masalah-masalah dalam negerinya (*American first*). Jadi negara-negara lain mengikuti pemilu tersebut untukantisipasi mengamankan kepentingan nasionalnya.

Selanjutnya, permasalahan yang ingin dikaji dari Pemilu Presiden Amerika 2016 yang lalu adalah soal perilaku media massa yang terbelah dan saling serang terhadap Kandidat Presiden. Sikap media terbagi ke dalam ke dalam dua kubu utama yaitu media yang simpati dan antipati terhadap kandidat Presiden Donald Trump maupun Hillary Clinton. Sesuatu yang tidak mengherankan perilaku media Amerika sebagian mendukung dan sebagian lagi menyerang baik terhadap Hillary maupun Trump. Oleh karena itu, dalam paper ini diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana persaingan diantara kandidat Presiden? Dan bagaimana pula perilaku media massa dalam persaingan tersebut?

Jadi tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji perilaku politik media massa di dalam Pemilu Presiden 2016. Kajian ini didasarkan pada konsep Liberalisme dan diperkuat oleh *review* beberapa referensi yang relevan, misalnya tulisan yang memuat konsep simpati-antipati dan partisipasi politik. Boleh diasumsikan bahwa perilaku politik media massa Amerika merujuk pada nilai-nilai Liberal karena secara umum nilai-nilai ini mendasari perilaku masyarakat Amerika.

Terdapat dua sumber utama nilai-nilai Liberal tersebut yaitu Deklarasi Kemerdekaan 1776 dan Konstitusi Amerika. Nilai-nilai Liberal khususnya nilai-nilai kebebasan tertuang pada alenia kedua Deklarasi Kemerdekaan Amerika tahun 1776 yang menjamin bahwa kebebasan adalah suatu pemberian Tuhan yang tidak bisa dihapuskan, sebagai berikut:

*“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.” (IHA,1995,1)*

Selanjutnya, nilai-nilai kebebasan yang dianut media massa Amerika juga bersumber pada amandemen pertama Konstitusi Amerika yang dikenal dengan *Bill of Rights*. Amandemen ini menempatkan nilai-nilai kebebasan pada hirarki politik yang sangat tinggi sehingga Kongrespun tidak boleh mengatur karena sangat tinggi dan agungnya nilai kebebasan, sebagai berikut:

[Amendment I.]

“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.” (OLL,2018,1)

Jadi, kedua dokumen di atas dipandang mendasari dan mempengaruhi perilaku media Amerika khususnya dalam Pemilu Presiden 2016. Perilaku politik media berpihak pada salah satu kandidat dipandang sebagai manifestasi kebebasan politik yang diberikan oleh Tuhan seperti yang tercantum pada Deklarasi Kemerdekaan 1776. Disamping itu, perilaku politik media ini juga dimaknai sebagai ekspresi kebebasan yang sangat dihormati dan berada pada hirarki politik yang tinggi seperti diamanatkan oleh amandemen pertama Konstitusi Amerika. Karena punya landasan hukum yang kuat, nilai-nilai kebebasan sangat dihormati di Amerika.

Pemahaman atas nilai kebebasan ini diperkuat oleh *review* tentang kebebasan media massa di Amerika Serikat. Fred. S. Siebert (1986, p. 2) dalam tulisannya berjudul *Teori Media Libertarian* memberi catatan tentang kebebasan media di Amerika. Dia menilai kebebasan media di AS tidak terlepas dari filsafat Liberal yang dianut oleh masyarakat Amerika. Filsafat Liberal berpandangan bahwa manusia berpikir rasional dan perilakunya didasarkan pada suatu tujuan tertentu. Doktrin liberal mendasari perilaku media di Amerika bahwa kebebasan berbicara dan kebebasan media merupakan hak azasi. Kebebasan ini didasarkan pada beberapa asumsi sebagai berikut: (1) bahwa manusia ingin mendapat kebenaran dan dibimbing oleh kebenaran itu. (2) Asumsi lainnya bahwa setiap orang punya pandangan berbeda oleh karena itu harus diberi ijin untuk menyampaikan pandangannya secara bebas. (3) Asumsi berikutnya, dengan saling toleransi dan membandingkan beragam pandangan yang disampaikan ini maka akan lahir pandangan yang rasional dan diterima oleh banyak orang.

Selanjutnya, Jos R. Long dalam tulisannya berjudul *the Freedom of the Press* berpandangan bahwa dengan adanya media suatu pemerintahan menjadi bertanggung jawab kepada masyarakat. “*It is through the press that governments are made responsible to people*” (Long, 1918, pp. 225–246). Dalam hal ini Long memandang media punya kontribusi penting agar suatu pemerintahan bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Oleh karena itu media perlu diberi kebebasan untuk melakukan fungsinya. Jika media tidak bebas dalam melakukan fungsi pengawasan maka pemerintah menjadi kurang bertanggung jawab kepada masyarakat.

Sebagai catatan walaupun berdasarkan Liberalisme, media di Amerika mempunyai tanggung jawab sosial. Hal itu antara lain: (1) Melayani sistem politik dengan menyediakan informasi dan diskusi tentang masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. (2) Memberi penerangan kepada masyarakat (3) Menjaga hak-hak individu dengan bertindak sebagai anjing penjaga (*watch dog*) yang mengawasi pemerintah (4) Melayani sistem ekonomi dengan menyediakan ruang iklan (5) Menyediakan hiburan (6) Mengusahakan sendiri biaya finansial sehingga bebas dari tarikan kepentingan dan independen (Peterson, 1986, p. 84). Dengan demikian, media Amerika membangun keseimbangan antara hak dan kewajiban atau antara kebebasan dan tanggung jawab sosial.

Selain dari itu, Graber (1976, p. 246) membagi perilaku media massa Amerika selama berlangsung pemilu, yaitu: (1) Media yang mencurahkan perhatiannya pada informasi kepribadian dan profesionalisme kandidat. (2) Media yang menelaah karakteristik dan gaya kepemimpinan. (3) Media yang memproyeksikan citra menguntungkan untuk pihak yang didukung atau untuk merugikan lawan. (4) Media yang memberitakan dan mengulas kemampuan calon dalam melaksanakan tugas-tugas kepresidenan (Ritchie, 2002, p. 740), untuk dibandingkan dengan

kandidat presiden yang sedang bersaing. Jadi, ada media netral-objektif dan ada media partisan-subjektif.

Selanjutnya, perilaku media juga dipahami dari konsep simpati-antipati. Simpati dimaknai sikap tertariknya individu terhadap terhadap orang lain (Gerungan, 1981, p. 73). Simpati dipahami sebagai sikap suka kepada pihak lain. Perasaan simpati merefleksikan alam bawah sadar dan perasaan yang mendorong kepada kedekatannya kepada individu. Sejumlah faktor yang melahirkan simpati, sebagai berikut: (1) karisma, (2) kepandaian, (3) kesolehan, (4) perilaku sopan, dan (5) penderitaan. Sebaliknya sikap antipati adalah kebalikan dari simpati. Sikap antipati dimaknai mengarah kepada sikap bermusuhan dan aksinya cenderung merugikan lawan. Sikap antipati memposisikan perang kepada lawannya (Gerungan dalam Siswanto, 2002, p. 100).

Akhirnya, perilaku media saat pemilu dipahami sebagai bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga negara dengan cara ambil bagian dalam proses pemilihan pemimpin yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Partipasi politik juga dilakukan dalam proses pembentukan kebijakan publik (McClosky dalam Damsar, 2011, p. 180).

**Tabel.1.** Bentuk Partisipasi Politik

<b>Konvensional</b>	<b>Non-Konvensional</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemungutan suara</li><li>• Diskusi politik</li><li>• Kegiatan kampanye</li><li>• Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan</li><li>• Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengajuan petisi</li><li>• Demonstrasi</li><li>• Konfrontasi</li><li>• Mogok</li><li>• Tindak kekerasan politik terhadap benda (perusakan, pemboman, pembakaran)</li><li>• Tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan)</li><li>• Perang gerilya dan revolusi</li></ul>

Sumber : Almond dalam Mas' oed & Andrew (1983)

Dalam tabel di atas terdapat beragam bentuk partisipasi politik dari yang konvensional sampai yang non-konvensional. Merujuk pada tabel di atas, partisipasi politik media dilakukan dengan diskusi politik dan kampanye sehingga berada dalam kategori partisipasi politik konvensional atau dalam tatanan demokrasi. Jadi saat musim kampanye media cetak maupun elektronik melakukan partisipasi politik secara konvensional melalui rubrik diskusi politik.

Masih merujuk pada tabel bentuk partisipasi politik di atas maka bentuk lainnya dari partisipasi politik media adalah kegiatan kampanye untuk kandidat tertentu. Media menyediakan ruang berkampanye yang tujuannya (1) mendukung koalisi politiknya. Targetnya adalah opini politik masyarakat mendekati kepada koalisi politiknya. Sebaliknya, (2) Media menyerang lawannya politik. Sasarannya adalah terbentuk opini publik yang negatif terhadap lawan politiknya dan targetnya adalah opini politik masyarakat menjauh dari lawan politiknya. Jadi, media juga ada yang partisan dalam sebuah proses politik dengan mendukung salah satu kekuatan yang sedang bersaing.

Sebagai gambaran tentang sikap partisan media dalam sebuah pemilu bisa dirujuk pada kasus perilaku media di AS pemilu tahun 1971. Survei tentang perilaku media dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap perilaku media di AS saat kampanye pemilu. Survei ini untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap perilaku media khususnya terkait soal rasa keadilan atas kekuatan politik yang sedang bersaing (Ericson, 1976, p. 140).

**Tabel.2.** Persepsi Masyarakat Amerika terhadap Perilaku Media

No	Persepsi Masyarakat	Prosentase
1	Adil	69%
2	Tidak adil, bias kekiri	7%
3	Tidak adil, bias ke kanan	2%
4	Tidak adil, bias kepada opini jalanan	6%
5	Tidak adil, lain-lain atau tidak ada penjelasan	6%
6	Tidak tahu atau tidak menjawab	10%

Sumber: Ericson (1976)

Dari data diatas, opini publik di AS sebagian besar pada masa itu berpandangan bahwa Media di AS berperilaku adil atau berimbang dalam melakukan pemberitaan dan memberikan opini kepada perkembangan politik. Pandangan ini didasarkan pada angka 69% atau angka tertinggi dari jajak pendapat pada masa itu.

Data di atas juga memberi gambaran persepsi masyarakat terhadap perilaku media atas partai politik yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik pada tahun 1971. Tabel di atas menunjukkan 2% opini publik berpandangan bahwa Media di AS bias ke kanan atau kepada kubu Partai Demokrat dan 6% opini publik berpandangan media bias ke kiri atau kepada kubu Partai Republik. Dalam pandangan masyarakat media di AS pada masa itu berpihak kepada Partai Republik dan berimplikasi pada kemenangan Presiden Nixon dari Partai Republik atas lawannya George McGovern dari Partai Demokrat pada Pemilu 1972 yang kemenangannya terjadi di 49 negara bagian atau mencapai angka 520 suara pemilih (*electoral vote*) yang menunjukkan kemenangan 98% Nixon atas lawannya. Selanjutnya, pada tahun 2002 juga dilakukan survey index keadilan pemilu yang dilaksanakan atas pemilu Presiden tahun 2000 di Amerika oleh NES Study. Adapun format pertanyaan menggunakan skala dari yang sangat tidak adil sampai dengan yang sangat adil. Hasilnya masyarakat Amerika berpandangan bahwa 41% menilai sangat adil, 19% adil, 8% tidak adil, dan 32% sangat tidak adil (Wattenberg, 2003, p. 894).

## 2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini didasarkan pada metode kualitatif. Metode kualitatif diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode ini menggambarkan latar dan subjek secara holistik (utuh) atau tidak mengisolasi subjek atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis (Moleong, 1994, p. 3).

Dalam metode kualitatif dikenal sejumlah teknik dalam pengumpulan data. Teknik-teknik itu meliputi pengamatan, wawancara catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Namun dalam penulisan paper ini ini hanya memanfaatkan teknik pengamatan tidak langsung dan studi dokumen. Teknik pengamatan tidak langsung yang dilakukan melalui strategi menelaah dan mencermati kegiatan dan perkembangan pemilu di Amerika Serikat tahun 2016 melalui media massa yaitu penelaah dilakukan melalui situs *Youtube* di internet dan televisi yang menginformasikan perkembangan pemilu AS 2016.

Apapun teknik penggunaan dokumen dilakukan melalui strategi studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan informasi dari bahan-bahan pustaka yang sudah ada. Bahan-bahan pustaka ini meliputi ; buku, informasi, dan jurnal ilmiah baik yang cetak maupun *on-line*.

Tahapan penulisan artikel ini dilakukan melalui dua tahap. Pertama adalah tahap pra penulisan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data baik primer maupun sekunder. Tahap kedua

adalah tahap penulisan yang dilakukan dengan cara penulisan draft, revisi, dan editing. Tahap editing dilakukan berulang untuk menghindari kesalahan baik bersifat substansi (isi) maupun kalimat (redaksional).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Peta Politik Pra-Pemilu

Berikut ini adalah sekilas fakta-fakta perjalanan Pilpres Amerika 2016. Seperti sudah diketahui bahwa pemilu pendahuluan dilaksanakan selama bulan Januari-Juni 2016. Pemilu pendahuluan adalah ajang pemilu internal partai untuk menjaring sejumlah kandidat. Pemilu pendahuluan di Partai Demokrat diikuti oleh calon kuatnya yaitu Hillary Clinton dan Bernie Sanders, sedangkan di Partai Republik diikuti oleh calon kuatnya; Donald Trump, Ted Cruz dan John Kasich's.

Tahap berikutnya adalah Konvensi Nasional. Konvensi Nasional dilaksanakan pada bulan Juli 2016. Tujuan dilaksanakan konvensi ini adalah untuk menetapkan secara definitif masing-masing dari partai untuk maju ke Pilpres 2016. Partai Demokrat melaksanakan konvensinya di kota Philadelphia, Pennsylvania, sedangkan Partai Republik melakukannya di kota Cleveland, Ohio. Konvensi ini menghasilkan masing-masing kandidat Presiden yang akan bersaing di Pilpres 2016. Pemilu pendahuluan ini menghasilkan kandidat unggulan dari masing-masing pihak yaitu: Hillary Clinton dari Partai Demokrat dan Donald Trump dari Partai Republik.

##### a) *Media Netral -Objektif*

Kantor berita Reuter melakukan *polling* pada minggu pertama bulan Juni 2016 hasilnya bahwa Clinton lebih unggul sedikit. Universitas Harvard juga melakukan *polling* pada minggu ke tiga bulan Juni 2016 hasilnyaimbang yaitu Clinton unggul pada isu kebijakan luar negeri, sedangkan Trump unggul pada isu perlindungan terhadap terorisme. Artinya, popularitas mereka berimbang.

Selanjutnya, hasil *Polling* pasca debat Capres putaran ke-1 tgl. 28 September 2016 di New York tidak begitu ada perubahan yang signifikan. Catatan dari CNN melaporkan posisi sementara adalah Clinton 45% dan Trump 43% (<http://cnn.com/election>, accessed September 30, 2016). Sedangkan New York Times melaporkan posisi sementara adalah Clinton 44% dan Trump 42% (Wilson Andrews.et.al.,2016). Sebagai catatan bahwa CNN melakukan *polling* sendiri, sedangkan New York Times merupakan hasil akumulasi rata-rata dari banyak lembaga survey.

Kemudian, hasil *polling* pasca debat putaran ke-2 tgl. 9 Oktober 2016 hasilnya juga tidak menunjukkan perubahan signifikan. CNN mencatat bahwa survey yang dilakukan menunjukkan Hillary tetap unggul atas Trump dengan skor Hillary 57% dan Trump 34% (Kristanti, 2016). Jika ingin dibandingkan justru terjadi selisih skor semakin jauh antara kedua kandidat dimana Clinton semakin meninggalkan Trump.

##### b) *Media Partisan-Subjektif*

Periode kampanye Pilpres AS 2016 juga diwarnai oleh munculnya isu atau pemberitaan negatif oleh media kepada kedua kandidat Presiden AS tersebut. Misalnya pada Maret 2015 Publik Amerika dikejutkan oleh pemberitaan bahwa Clinton menggunakan server pribadi untuk kepentingan dinas. Hal ini adalah temuan Biro Penyelidik Federal (*Federal Bureau of Investigation*) atau FBI yang diekspos ke Media. FBI menjelaskan terdapat 10.000 halaman *email* terkait dengan Clinton di Kementerian Luar Negeri diselidiki. Ini merupakan surat-menyurat Clinton 17 s.d 10 bulan ke belakang dari per bulan November 2016. Lebih jauh, James Comey,

Direktur CIA menyatakan bahwa sementara ini terdapat 110 *email* yang tergolong rahasia, 65 dianggap rahasia, dan 22 sangat rahasia.

Isu *email* Clinton semakin mencuat kepermukaan setelah dilakukan acara dengar pendapat (*hearing*) dirinya dengan Kongres AS. Isu *email* pribadi kembali diangendakan, walaupun acara ini sebenarnya dilakukan dalam konteks kasus pemboman di Benghazi, Libya, yang menewaskan seorang Diplomat AS. Dalam dengar pendapat ini sejumlah pakar yang diundang dan anggota DPR berpandangan bahwa tindakan Clinton itu melanggar UU Federasi dan peraturan protokoler administrasi, sebaliknya Clinton berpandangan hal tidak melanggar keduanya ( [www.usnews.com/news/article/2017-02-07/hillary-email-cases-still-smoulder-with-flls-eager-spash-new-investigation](http://www.usnews.com/news/article/2017-02-07/hillary-email-cases-still-smoulder-with-flls-eager-spash-new-investigation), diakses pada Februari 10, 2017) Saat itu seorang Senator mengkonfirmasi *email* pribadi yang digunakan oleh Clinton tersebut bernama, *clintonemail.com*, *wjcoffice.com*, and *presidentclinton.com* yang terdaftar pada Eric Hotelham.

Sebaliknya, kubu Trump juga terkena pemberitaan negatif dari media terkait dengan foto tanpa busana istri Trump yaitu Melania Knauss pada majalah New York Post edisi Juli 2016. Walaupun photo ini diambil di Manhattan tahun 1996 dan selanjut muncul pada majalah pria dewasa di Prancis tahun 1997 yang bangkrut pada tahun 2006.

Hal ini menimbulkan kontroversi opini di masyarakat AS. Sebagian mereka mengecam hal itu karena seorang ibu negara Amerika Serikat tidak pantas punya catatan buruk masa lalunya. Sebaliknya, sebagian masyarakat lainnya berpandangan bahwa pose Melania itu adalah sikap profesional seorang model.

Selanjutnya, Trump juga dilanda pemberitaan negatif yang merendahkan perempuan. Pada sewaktu kesempatan Trump berdialog dengan rekannya yang berkonotasi merendahkan derajat perempuan. Trump membela diri dengan berargumentasi bahwa dialog tersebut adalah dialog di ruang ganti pakaian. Sebagian masyarakat AS berpandangan bahwa sikap merendahkan perempuan tidak boleh terjadi dimanapun.

### **3.2. Peta Politik Hari Pelaksanaan Pemilu**

Hasil Pilpres pada 8 November 2016 hasilnya mengejutkan. Hillary Clinton memperoleh suara pemilih (*electoral vote*) 232, sedangkan Donald Trump memperoleh suara 306 (<http://www.politico.com/2016-election/results/map/president>, diakses pada February 9, 2017). Walaupun selama kampanye jajah pendapat menunjukkan Clinton unggul atas Trump, tetapi hasil akhirnya justru Trump yang menang.

Hasil Pemilu yang memberi kemenangan Kepada Trump ini menimbulkan tanda tanya atau keheranan luar biasa kepada masyarakat AS sendiri maupun masyarakat internasional. Kondisi ini menimbulkan beragam spekulasi, tetapi salah satu spekulasi yang paling santer adalah adanya intervensi Rusia atas sistem teknologi informasi dari Komisi Pemilu AS. Kecurigaan ini merujuk pada peristiwa sebelumnya dimana Rusia meretas sistem informasi Partai Demokrat dan membuka tabir strategi /rahasia partai tersebut Pilpres 2016. Pihak Trump tidak menolak dan tidak pula menyetujui atas tuduhan intervensi tersebut, sebaliknya Rusia menolak hal itu. Ketika masih berkuasa Presiden Obama memerintahkan CIA untuk menyelidiki kasus ini.

Kasus ini masih menjadi perdebatan di Kongres sampai sekarang, tetapi nampaknya Partai Republik melindungi Presiden Trump sehingga kasus ini akan menguap. Fakta-fakta dikumpulkan salah satunya adalah fakta terjadi pertemuan antara tim kampanye Presiden Trump dan staf kedutaan Rusia saat berlangsung kampanye Presiden. Fakta lain setelah berkuasa Presiden Trump memecat direktur CIA yang ingin membongkar kasus tersebut.

### 3.3. Peta Politik Pasca-Pemilu

#### a) Penolakan Hasil Pemilu

Hasil pilpres 2016 ini diprotes oleh para pendukung Hillary khususnya di California. Diperkirakan sekitar 10.000 orang demontran dan pendukung Hillary menolak hasil Pilpres ini. Hal serupa juga terjadi di berbagai negara bagian lainnya seperti New York, Washinton. DC, Pennsylvania, Iowa, beberapa kota besar seperti Los Angeles, San Francisco, beberapa negara lain seperti : Inggris, Kanada, Australia, Israel. Bahkan demontran di California saking emosinya mewacanakan untuk keluar dari Federasi Amerika Serikat.

Mereka mengkhawatirkan dengan kebijakan Trump yang kontroversi saat kampanye. Mereka cemas dengan kebijakan anti Muslim dan kemungkinan pendeportasian mereka, walaupun akhirnya Pasca Pelantikan Presiden Trump terdapat 7 (tujuh) negara muslim kecil yang dilarang masuk AS yaitu: Somalia, Sudan, Libya, Suriah, Irak, Yaman, dan Iran. Kebijakan imigrasi diskriminatif ini ditolak oleh Pengadilan Federal, sebaliknya pihak Trump menilai keputusan Pengadilan Federal tersebut ceroboh. Sejalan dengan hal itu, Jaksa Agung negara bagian Washington dan Minnesota berpandangan bahwa pembatalan sementara itu tetap berlaku karena kebijakan Trump tersebut telah menimbulkan gejolak.

Para demontran mengkhawatirkan kebijakan Trump lainnya yang bernuansa diskriminasi. Misalnya Trump juga dikhawatirkan tidak memberi kebebasan kepada kelompok sosial LGBT, Afro-Amerika. Selain dari itu, kemenangan Trump dikhawatirkan mendorong kelompok sosial tertentu mengkampanyekan kembali isu pelarangan aborsi dan meningkatnya pelecehan sex kepada kaum perempuan karena Trump juga punya catatan buruk terhadap perempuan.



Sumber: Google.com (diakses 26 Februari 2018)

**Gambar 1.** Poster Kampanye Trump

#### b) Perilaku Media dan Masyarakat

*The Huffington Post* terkadang disingkat *Huff Post* atau *Huff Po* adalah media *on line* dan *blog*. Media sosial *on-line* ini didirikan tahun 2005 oleh Arianna Huffington, Kenneth Lerer, Jonah Peretti, and Andrew Breitbart. Media sosial *on line* ini memuat berita politik, bisnis, hiburan, lingkungan, teknologi, gaya hidup, kebudayaan, komedi, hidup sehat, masalah perempuan, dan berita lokal. Gambar disamping adalah upaya yang dilakukan oleh The Huffpost dalam memperjuangkan kandidat President Trump saat berlangsung kampanye.





Sumber: Google.com (diakses 26 Februari 2018)

**Gambar 2.** Cover Koran New York Post

Perilaku media *the Huff Post* saat aksi demo pasca-Pemilu 8 November 2016 menarik untuk disimak. Wartawan *Huffington Post* berdialog dengan demonstran dimana mereka menyampaikan isu hasil Pemilu yang diragukan, tetapi yang menarik wartawan malah menggiring kepada isu kebijakan Trump kedepan yang mengancam sebagian golongan minoritas dan eksistensi muslim di Amerika.

Selanjutnya, media lain yang juga berperilaku partisan adalah Harian New York Post yang dipandang berpihak kepada Clinton. Dalam salah satu terbitnya menjelang Pilpres mengambil judul Headline yaitu *No Wonder Bill's Afraid*. Judul ini untuk menggambarkan situasi dengan pendapat antara Kongres dengan Clinton sesaat menjelang Pilpres dan dipandang ini merugikan kandidat Presiden Clinton. Saat itu sebagian anggota kongres khususnya dari Partai Republik mengkritik kebijakan Clinton sebagai Menteri Luar Negeri yang tidak mampu melindungi Duta Besar AS di Libya sehingga tewas dalam suatu insiden pengeboman di Benghazi.

### 3.4. Diskusi

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa dalam level analisis perilaku, ada tingkatan sebagai berikut: 1) level struktur sosial yang terdiri dari interaksi dan koneksi, 2) level individu didalamnya memuat aspek inter-relasi, relasi, dan interdependensi, 3) level kultural di dalamnya terkandung hal-hal sebagai berikut: norma, harapan, hak dan kewajiban, dan pola perilaku.

Dalam kampanye Pilpres di AS Januari sampai November 2016 sejumlah media berperilaku atau berperan partisan untuk mendukung atau mengkritik salah satu kandidat. Peran ini dilakukan oleh media karena didasarkan pada kondisi-kondisi yang melingkupinya yaitu : dimensi budaya, sosiologis, dan psikologis masyarakat Amerika Serikat. Ketiga dimensi ini menjadikan peran media pada Pilpres tersebut dapat dipahami secara komprehensif karena didekati berdasarkan pendekatan interdisiplin.

Dari dimensi budaya, masyarakat Amerika sebagai negara demokrasi memberi apresiasi pada nilai-nilai kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berekspresi. Nilai-nilai kebebasan dan norma-norma hak-kewajiban politik diimplementasikan dalam kehidupan sosial-politik khususnya saat berlangsung kampanye Presiden. Sedangkan, dari dimensi Sosiologis, masyarakat Amerika strata sosialnya terdiri dari beragam ras dan golongan baik kulit putih maupun kulit berwarna, tetapi memberi ruang yang sama dalam partisipasi politik sesuai dengan Konstitusi Amerika Serikat. Strata sosial yang berbeda tidak menjadi halangan bagi masyarakat termasuk

media massa untuk terlibat dalam proses politik. Terakhir, dimensi Psikologis juga melatar belakangi peran media massa dalam pilpres tersebut. Dimensi psikologis ini meliputi harapan masyarakat akan adanya seorang Presiden Amerika yang mampu membawa Amerika kembali menjadi kuat dan berwibawa, kecemasan masyarakat atas perekonomian Amerika yang belum kunjung baik, kekhawatiran masyarakat akan bahaya teroris yang saat kampanye melakukan aksi di dalam negeri Amerika.

Jadi, perilaku partisan dalam Pilpres ini dipahami sebagai bentuk manifestasi dari peran media dalam proses politik yang sedang berlangsung dalam hal ini pilpres 2016. Peran ini dimaknai sebagai: (1) ekspresi kebebasan masyarakat AS dalam kehidupan politiknya, (2) bentuk manifestasi dari partisipasi politik masyarakat AS di dalam proses politik, dalam hal ini Pilpres dan (3) Partisipasi ini dibedakan dalam dua kategori yaitu simpati dan antipati kepada salah satu calon presiden.

Partisipasi politik media ini punya dimensi idealis dan ekonomi dari media situ sendiri. Hal ini maksudnya bahwa media Amerika punya misi untuk menyebarkan informasi-informasi pemilu sebagai bentuk sosialisasi politik kepada masyarakat. Di lain pihak, pemberitaan dan diskusi ini juga punya dimensi ekonomi karena biasanya hal ini akan sangat ditunggu oleh masyarakat. Akibatnya, permintaan kepada upaya pemberitaan itu dan diskusi soal pemilu juga meningkat sehingga akan berdampak positif bagi pendapatan media tersebut.

Media menyelenggarakan diskusi untuk memproyeksikan citra yang menguntungkan salah satu atau merugikan pihak yang lain. Dalam posisi ini jelas media merupakan alat kepentingan politik dan strategi pemenangan kandidat salah satu calon dalam ajang Pilpres. Hal ini tentu saja dilakukan dengan derajat yang berbeda antara satu media dengan media lainnya. Ada media yang jelas-jelas menunjukkannya keberpihakkannya, tetapi adapula media yang tidak begitu jelas dalam memberi dukungan atau masih ada nuansa netral walaupun hanya sedikit porsinya.

Seperti tersebut di atas keberpihakan media kepada salah satu kandidat akan berpengaruh kepada terbentuknya opini publik dan sekaligus opini politik rakyat Amerika. Bahkan, media dipandang sebagai kekuatan yang sangat berpengaruh kepada terbentuknya opini publik di negara-negara yang menganut tatanan demokrasi seperti Amerika. Dalam hal ini, opini publik itu sendiri dimaknai sebagai pendapat kelompok masyarakat atau sintesis dari pendapat yang diperoleh dari suatu diskusi sosial dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan isu yang sedang ramai menjadi perbincangan publik.

Dinamika politik dalam musim kampanye opini publik biasanya berkembang menjadi opini politik. Perbincangan sosial tentang isu tertentu berkembang menjadi pandangan politik tertentu terhadap peta kekuatan politik yang sedang bersaing. Efektivitas dalam merubah opini publik menjadi opini politik tergantung dari jenis isu yang diangkat, kemampuan media yang bersangkutan dalam mempengaruhi publik, dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap isu yang sedang diangkat dari opini publik menjadi opini politik.

#### **4. PENUTUP**

Berdasarkan kajian di atas, ditarik kesimpulan bahwa perilaku media masa saat kampanye pemilu Amerika secara umum dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu: (1) kelompok media netral dan (2) kelompok media partisan. Kelompok media netral hanya bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat perihal: kepribadian, tingkat profesionalisme, karakteristik, dan gaya kepemimpinan seseorang. Sedangkan, kelompok media partisan bertujuan untuk membantu pihak kandidat tertentu yang didukung.

Perilaku media partisan ini sebagai manifestasi dari kondisi sosio-politik dari masyarakat Amerika. Masyarakat Amerika yang didasarkan pada ideologi Liberal berpengaruh kepada perilaku media yang juga memiliki ciri Liberal atau mengedepankan nilai-nilai kebebasan. Dalam konteks kebebasan berpendapat ini pula media Amerika punya kebebasan untuk menentukan sikap atau partisan dalam pemilu AS, termasuk di dalamnya Pemilu Presiden 2016.

Selanjutnya, perilaku media yang partisan dalam pemilu juga dimaknai sebagai bentuk partisipasi politik. Media sebagai bagian penting dari masyarakat Amerika dipandang punya kewajiban moral untuk hadir dan melakukan partisipasi politik pada proses politik yang sedang berlangsung dalam hal ini saat terjadi pemilu. Media berperan dalam proses menentukan masa depan negara atau perjalanan bangsa Amerika.

Beberapa pelajaran bisa dipetik dan menjadi saran-saran atau rekomendasi, yaitu : (1) Negara-negara yang rakyat sudah paham tentang nilai-nilai kebebasan secara benar, mampu berpikir mandiri dan kritis terhadap fenomena politik, dan sistem hukum sudah adil, maka perilaku medianya bisa melakukan fungsi kebebasan dan fungsi partisipasi politik seperti di Amerika. (2) Sebaliknya, jika kondisi-kondisi di atas belum terpenuhi, media sebaiknya lebih mengedepankan fungsi pendidikan politik dan berperilaku netral ketimbang partisan dalam musim pemilu karena perilaku media akan berdampak pada opini publik, opini politik, dan perilaku politik masyarakat.

Kedepan bangsa Indonesia perlu punya sistem media yang bercirikan Indonesia. Sistem media yang sesuai dengan kondisi sosio-politik masyarakat Indonesia. Seperti halnya sistem media Amerika yang merujuk pada Liberalisme. Media punya fungsi edukatif Jangan sampai nilai-nilai kebebasan mengarah kepada opini publik yang kontra produktif dengan semangat nasionalisme.

Kebebasan ini diharapkan berkembang bukan tanpa batas atau kebebasan yang “kebablasan”. Media di Amerika Serikat sendiri sebagai *champion of democracy* tetap merujuk pada peraturan yang ada. Nilai-nilai Liberal tidak berdiri sendiri, tetapi diimbangi oleh nilai-nilai tanggung jawab sosial. Media punya hak kebebasan berekspresi, tetapi juga punya tanggung jawab sosial.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis Mengucapkan puji syukur kehadiran Allah, Tuhan yang Maha Esa dengan selesainya penulisan paper ini. Semoga paper ini memberi sumbangan signifikan kepada perkembangan kajian keilmuan dan praktik kehidupan media massa di tanah air. Sejalan hal itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu sehingga paper ini selesai sesuai dengan ketentuan yang diisyaratkan pada jurnal komunikasi dan media, Kementrian Kominfo, khususnya bapak dan ibu pengelola jurnal yang tidak disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis. Semoga jasa baik bapak dan ibu menjadi amal kebaikan yang akan diganjar oleh Allah. Akhirul kalam, mohon maaf atas kekurangan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andrews ,Wilson.et.al., “Latest Election Polls 2016, “<https://www.nytimes.com/interactive/2016/us/elections/polls>. (diakses pada September 30, 2016)
- Damsar, 2011. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Elin Yunita Kristanti, 2016. “Debat Panas Kedua Capres AS, Hillary Menang atas Trump. <http://global.liputan6.com/read/2622284/debat-panas-kedua-capres-ashillary-menang-atas-trump>), (diakses pada Oktober 18, 2016)
- Ericson, Robert. et.al. 1980.American Public Opinion: Its Origins, Content, and Impact NY: John Wiley & son
- Gerungan, 1981.Psikologi Sosial. Jakarta:PT.Eresco.
- Graber A. Daris. 1976. Press and TV as an Opinion Resources in Presidential Campaign. The Public Opinion

- Quartely. Journal Of American Association for Public Opinion Research. (Autumn, 1976), <http://www.jstor.org/stable/2748248> (diakses pada February 4, 2018)
- Jos R. Long, 1918. "the Freedom of press." Virginia, Journal of Law Review, Vol. 4, (January 1918), <http://www.jstor.org/stable/1063583> (diakses pada February 2, 2018)
- Lexy J. Moleong. 1988. Metododologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
- Larkin, Felix. M, 2013. Was JFK a Great American President? Studies: An Irish Quartely Review, Vol.102,,No.407, 2018) ( Autumn 2013), <http://www.jstor.org/stable/23631185> (diakses pada February 3, 2018)
- Laski, Harold J, 1949. "The American President and Foreign Relations," the Journal of Politics, Vol. 11, No.1, The University of Chicago, Press, (February 1), <http://www.jstor.org/stable/2126504?> (diakses pada February 5, 2018)
- Mochtar Mas'ued dan Clolin Mac Anndrew. 1983. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- OL.L, 1933. The American President and the Economic Crisis. Bulltein of International News, Vol 9, No.23, (May 11), <http://www.jstor.org/stable/25639162> (diakses pada February 2, 2018)
- Online Library of Liberty :A collection of scholarly works about individual liberty and free markets. "2016. 1791: US Bill of Rights (1st 10 Amendments) - with commentary," <http://oll.libertyfund.org/pages/1791-us-bill-of-rights-1st-10-amendments-with-commentary>, diakses pada 2 Mei 2018
- Peterson, Theodore.1986 ."Teori Media Tanggung jawab Sosial. "Empat Teori Media. Jakarta: Penerbit PT. Intermedia.
- Ritchie, Donald A, 2002. The American President, The Journal of American History, Vol.89, No.2, (September 1), <http://www.jstor.org/stable/3092335> (diakses pada February 2, 2018)
- Siswanto.2002. "Bias Media Massa AS dan Kemerdekaan Timor Timur."Jurnal Penelitian Media dan Pendapat Umum.Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi DKI Jakarta.Lembaga Informasi Nasional.
- Siebert, S.Fred. 1986 ."Teori Media Libertarian. "Empat Teori Media.Jakarta: Penerbit PT. Intermedia.
- USNews .Hillary Email Cases Still Smoulder withfills. [www.usnews.com/news/article/2017-02-07/hillary-email-cases-still-smoulder-withfills-eager-spash-new-investigation](http://www.usnews.com/news/article/2017-02-07/hillary-email-cases-still-smoulder-withfills-eager-spash-new-investigation) (diakses pada Februari 10, 2017)
- Wattenberg, Martin P. .2003. Was the 2000 Presidential Election Fair? Presidential Studies Quartely, Vo.33.No.4, (December 2003), <http://www.jstor.org/stable/27552542> (diakses pada February 1, 2018)
- Yatanoor, Chandrakant, (2005). "American Presidential election -2005: Post Election Analysis," The Indian Journal of Political Science, Vol.LXVI,No.1.Jan-March,